Pemerintah Kota Pasuruan
Dinas Sosial

RENCANA KERJA PERUBAHAN

Dinas Sosial Kota Pasuruan TA. 2025



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS SOSIAL
Jalan Balaikota Nomor 10, Kandangsapi, Panggungrejo, Pasuruan, Jawa Timur 67125,
Telepon/Faksimile (0343) 423628,
Laman dinsos.pasuruan.go.id, Pos-el dinassosialpasuruan@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA PASURUAN
NOMOR : 800.1.11.1/ 1072 /423.105/2025

TENTANG

TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA

DINAS SOSIAL TAHUN 2025

Menimbang :

a. Bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pasuruan ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Pasuruan tentang Pembentukan Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Wali Kota Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Pasuruan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini :

1. Menghimpun, memilah, dan menganalisa bahan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2025;
2. Merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan agenda dan jadwal penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2025;
3. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan pihak-pihak terkait;
4. Menyusun laporan pelaksanaan evaluasi Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2025;
5. Menyusun rancangan dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2025;

6. Menetapkan rancangan dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2025

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Pasuruan

Pada Tanggal : 26 Juni 2025

Kepala Dinas Sosial

Kota Pasuruan

KOKOH ARIE HIDAYAT,S.E.S.Sos.,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 197609191996021003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PASURUAN

NOMOR : 800.1.11.1/ 1072/423.105/2025

TANGGAL : 26 Juni 2025

TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA

DINAS SOSIAL KOTA PASURUAN

TAHUN 2025

No	Kedudukan Dalam Tim	Kedudukan Dalam Jabatan
1	*2*	*3*
1	PENANGGUNG JAWAB	Kepala Dinas Sosial Kota Pasuruan
2	KETUA	Sekretaris Dinas Sosial Kota Pasuruan
3	SEKRETARIS	Plt. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
4	ANGGOTA	a. Sekretariat Dinas Sosial Kota Pasuruan
		- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		b. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
		- Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
		c. Bidang Rehabilitasi Sosial
		- Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
		d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
		- Kepala Bidang Perlindundan dan Jaminan Sosial

Kepala Dinas Sosial

Kota Pasuruan

KOKOH ARIE HIDAYAT, S.E.,S.Sos.,MM

Pembina Utama Muda

NIP. NIP. 197609191996021003

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pasuruan merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Kota Pasuruan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan, Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) Perangkat Daerah dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) melalui penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (P-APBD) Kota Pasuruan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum yang mendasari penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2025 diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021 Nomor 4);
7. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial;
8. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor Tahun tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pasuruan Tahun

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini diantaranya adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2025, review pelaksanaan program/kegiatan tahun 2025 yang selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) Dinas Sosial Kota Pasuruan tahun 2025.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Pasuruan adalah untuk menjadi pedoman perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan tahun depan dan untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA)

Perangkat Daerah ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika dokumen Perubahan Renja Tahun 2024 disajikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika penulisan Dokumen Perubahan Renja.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TRIWULAN 1 TAHUN 2025

Pada bab ini dijelaskan capaian dan evaluasi atas Renja Perangkat Daerah Triwulan 1 Tahun 2025 (faktor pendorong dan faktor penghambat) serta tindak lanjut atas hasil evaluasi tersebut.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini diuraikan Perubahan Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025

BAB IV PENUTUP

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TRIWULAN 1 TAHUN 2025

2.1 Hasil evaluasi renja perangkat daerah sampai triwulan 1 tahun 2025

Rencana Kerja Perubahan merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah/PD untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Dinas sebagai bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Dalam pencapaiannya ditemukan beberapa kendala dan permasalahan, diantaranya adalah:

1. Masih terdapat kegiatan yang belum dilaksanakan sesuai dengan arus kas
2. Melakukan identifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab kegiatan belum dapat dilaksanakan tepat waktu serta solusi mengatasinya.

Adapun faktor pendukung dalam pencapaian target kinerja Dinas Sosial adalah adanya regulasi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Terkait dengan hal tersebut, Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini menyajikan dasar pengukuran kinerja program dan kegiatan dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Sosial selama tahun 2025 dan tahun berjalan 2025. Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2025 telah dilewati. Adapun evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Sosial sampai Triwulan I secara rinci dituangkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1

Tabel Evaluasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial sampai Tribulan I

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan output	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (sampai Triwulan I)	Capaian (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
				K	K	K	K	K	Rp	K	Rp
	Sasaran 1: Meningkatnya Sistem Tata Kelola Yang Baik Dalam Menjamin Pelayanan Prima	Nilai SAKIP SKPD	Nilai	75							
	Sasaran 1: Meningkatnya Sistem Tata Kelola Yang Baik Dalam Menjamin Pelayanan Prima	Persentase Temuan Anggaran Yang Ditindaklanjuti	Persen	100							
	Sasaran 2: Meningkatnya Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS Yang Terakses Layanan Sosial Dasar	Persen	97							

1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**Rp1.087.362.555**	**33,67**	**Rp1.098.143.055**
1.06.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**Rp13.119.900**	**33,33**	**Rp14.615.100**
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	30	6	4	66,67	4	Rp12.214.700	7	Rp70.427.500
1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	10	5	0	0	0	Rp725.200	0	Rp4 823.975.387
1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	10	1	0	0	0	Rp180.000	0	Rp40.089.373.169
1.06.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**Rp845.938.352**	**33,33**	**Rp845.938.352**
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/Bulan	26	26	26	100	26	Rp839.052.052	26	Rp840.166.952
1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	30	17	7	41,18	7	Rp6.886 300	17	Rp35.280.669.082

1.06.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase laporan barang milik daerah yang tersususn tepat waktu**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**Rp8.582.000**	**35**	**Rp15.306.904**
1.06.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	20	4	2	50	2	Rp8.582.000	14	Rp17.739.100
1.06.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase SDM Aparatur yang meningkat kompetensinya**	**%**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**	**Rp282.000**	**0,67**	**Rp482.000**
1.06.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	16	4	0	0	0	Rp282.000	26	Rp210.440.346
1.06.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase terpenuhinya layanan Administrasi perkantoran**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**Rp49.193.704**	**43**	**Rp82.166.604**
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	35	6	0	0	0	Rp0	83	Rp179.270.140
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	35	12	1	8,3	1	Rp234.000	17	Rp82.687.470
1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	120	1	6	100	6	Rp255.000	121	Rp4.311.500
1.06.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	1	1	100	1	Rp4.995.000	92	Rp216.582.576
1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	25	12	3	25	3	Rp217.000	105	Rp787.000
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Laporan	500	12	3	25	3	Rp43.492.704	7	Rp88.863.004

1.06.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**Rp75.711.688**	**38,67**	**Rp139.700.539**
1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	32	8	8	100	8	Rp75.711.688	15	Rp81.176.688
1.06.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**Rp64.913.889**	**37,67**	**Rp93.061.889**
1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	955	12	1	8,33	1	Rp500.000	102	Rp30.814.850
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	60	12	3	25	3	Rp18.405.829	3	Rp155.231.364
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	1000	12	3	25	3	Rp46.008.060	361,8	Rp229.535.675
1.06.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara**	**%**	**80**	**100**	**100**	**100**	**100**	**Rp29.621.022**	**33,33**	**Rp32.553.022**
1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabtan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	13	1	1	100	1	Rp8.966.382	0,33	Rp11.146.382

1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	13	10	10	100	10	Rp19.494.640	3,67	Rp254.668.720
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	11	15	15	100	15	Rp1.160.000	18	Rp13.349.692.667
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	109	4	4	100	4	Rp0	1,33	Rp13.205.038.587
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Bantuan Sosial yang Tersalurkan	%	100	100	10	10	10	Rp1.261.500.149	100,67	Rp5 249.035.949
		Persentase PSKS yang Aktif	%	89	89	30	33,71	30	Rp1.261.500.149	109,94	Rp5 249.035.949
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/Kota	Persentase PSKS yang meningkat kapasitasnya	%	60	89	20	22,47	20	Rp1.261.500.149	1717	Rp7 105.424.149
1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	408	108	94	87,04	94	Rp186.038.209	94	Rp1 913.502.309
1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	16	4	4	100	4	Rp4.180.000	4	Rp4.180.000

1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Keluarga Yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaega	25976	2954	1303	44,11	1303	Rp827.614.100	1303	Rp827.614.100
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	20	3	5	166,67	5	Rp243.607.840	5	Rp243.607.840
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang direhabilitasi sesuai tahun dasar	%	9,2	9,2	4,6	50	4,6	Rp115.099.644	1,53	Rp115.099.644
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan Layanan Sosial	%	26	9,2	4,65	50,54	4,65	Rp18.153.750	1,55	Rp18.153.750
1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	220	50	4	8	4	Rp18.153.750	4	Rp18.153.750
1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	40	20	0	0	0	Rp0	0	Rp0

	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial										
1.06.04.2.02	(PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pant Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan Layanan Sosial	%	48,2	9,2	9,2	100	9,2	Rp96.945.894	9,2	Rp96.945.894
1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah orang yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	38	0	0	0	Rp0	0	Rp0
1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan Alat Bantu, dan Alat Bantu Peraga sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	11	25	0	0	0	Rp0	0	Rp0
1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	6516	1657	244	14,73	244	Rp81.701.594	244	Rp81.701.594
1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	125	25	83	332	83	Rp15.244.300	83	Rp15.244.300
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase DTKS yang di update	%	2,9	1,4	1	71,43	1	Rp77.911.370	1	Rp77.911.370
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota	Persentase DTKS yang di update	%	2,9	4288	0	0	0	Rp77.911.370	0	Rp77.911.370

1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota	Jumlah Keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	6452	45495	228	0,50	228	Rp33.862.810	76	Rp33.862.810
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	7629	692	55	7,95	55	Rp34.348.560	55	Rp34.348.560
1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	4684	1467	0	0	0	Rp9.700.000	0	Rp9.700.000
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban bencana yang tertangani	%	65,98	63	100	158,73				
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kab/Kota	Persentase korban bencana yang mendapat layanan kebutuhan dasar	%	66	63	100	158,73	100	Rp10.620.000	100	Rp10.620.000
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3 x 1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jiwa	20000	12000	3175	26,46	3175	Rp10.620.000	3175	Rp10.620.000

	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota									
1.06.06.2.01.0002			Orag	20	100	0	0	0	Rp0	0	Rp0
1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit	4	4	0	0	0	Rp0	0	Rp0
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	50	0	0	0	Rp0	0	Rp0
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	25	25	0	0	0	Rp0	0	Rp0
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kab/Kota	Persentase taruna siaga bencana yang aktif	%	90	63	100	158,73	100	Rp26.728.630	100	Rp26.728.630
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	61	48	46	95,83	46	Rp26.728.630	46	Rp26.728.630
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase cakupan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	%	2,21	2,1	100	100	100	Rp3.110.000	100	Rp3.110.000

1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	%	1,72	2,1	100	100	100	Rp3.110.000	100	Rp3.110.000
1.6.7.2.1.2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaanya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	254	254	255	100,39	255	Rp3.110.000	255	Rp3.110.000

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Pasuruan

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2022, dalam mencapai kinerja pelayanan Dinas Sosial Kota Pasuruan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas pokok melaksanakan fungsi urusan sosial. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi tersebut Dinas Sosial Kota Pasuruan mempunyai beberapa indikator sebagai berikut :

1. Tujuan Meningkatnya kemandirian pemerlu pelayanan sosial dasar (PPKS) dengan indikator Persentase PPKS priorotas yang mandiri memenuhi kebutuhan sosial dasarnya tahun 2024 yaitu 15,55% dengan target 5%.
2. Sasaran Meningkatnya Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan indikator Persentase PPKS yang terakses layanan sosial dasarnya tahun 2024 tercapai 99,88% dengan target 95%.

Pada tahun 2025 terjadi perubahan pada Tujuan serta Indikator yang menyesuaikan Pohon Kinerja Tahun 2025 - 2029. Adapun perubahan yang dimaksud dijelaskan lebih lanjut pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Pasuruan

No	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi		Target P-Renja		Catatan Analisis
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2025	
1.	%PPKS Prioritas yang mandiri memenuhi kebutuhan sosial dasarnya	5%	5%	5%	5%	3%	16%	5%	5%	
2.	%PPKS yang terakses layanan sosial dasar	90%	92%	95%	97%	93%	100%	95%	5%	
Tujuan dan Sasaran Sesuai Pohon Kinerja 2025-2029										
1.	%PPKS Yang Mandiri Memenuhi Kebutuhan Sosial Dasarnya	-	-	-	-	-	-	-	15%	
2.	%PPKS Yang Terakses Layanan Sosial Dasar	-	-	-	-	-	-	-	64%	

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mempedomani Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Pasuruan Tahun 2025;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan terpilih Tahun 2025-2029;
3. Merespon isu-isu strategis Bappelitbangda Kota Pasuruan;
4. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan;
5. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Kota Pasuruan pada tahun 2025 adalah sebanyak 6 program, yang terdiri dari 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan 5 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Bappelitbangda pada APBD tahun 2025 adalah sebanyak 15 kegiatan yang terdiri dari 8 kegiatan penunjang dan 7 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial;
3. Jumlah sub kegiatan yang dilaksanakan Bappelitbangda Kota Pasuruan pada tahun 2025 adalah sebanyak 41 sub kegiatan yang terdiri dari 21 sub kegiatan penunjang, dan 20 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial;
4. Jumlah perubahan total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Bappelitbangda Kota Pasuruan Tahun 2025 adalah dari Rp. 19.011.750.085 menjadi Rp.

17.806.495.136 yang bersumber dari dana APBD Kota Pasuruan. Penurunan dana ini disebabkan adanya efisiensi anggaran tetapi tanpa menurunkan target kinerja.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2025 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pasuruan Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14	15	16	17
						DINAS SOSIAL				24.456.878.973,00	19.011.750.085,00	18.179.640.934,00							27.522.441.333,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				24.456.878.973,00	19.011.750.085,00	18.179.640.934,00							27.522.441.333,00	
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				24.456.878.973,00	19.011.750.085,00	18.179.640.934,00							27.522.441.333,00	
1	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100 %	100 %	4.965.638.590,00	4.854.516.262,00	5.225.409.319,00							5.789.942.754,00	
	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	100 %	100 %	44.659.400,00	34.151.200,00	34.151.200,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Dinas Sosial		46.893.463,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	34.760.200,00	28.598.100,00	25.222.200,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			36.498.347,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan	4.297.500,00	2.866.300,00	1.811.900,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			4.512.585,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	5.601.700,00	2.686.800,00	1.390.100,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia			5.882.53100	DINAS SOSIAL

														Kel/Desa			dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli				
	1	0S	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yag tersusun tepat waktu	100 %	100 %	3.837.351.730,00	3.816.755.078,00	3.816.755.078,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Dinas Sosial		4.029.441.917,00	DINAS SOSIAL
	1	0S	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang /bulan	26 Orang /bulan	3.803.103.130,00	3.785.154.978,00	4.078.831.584,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			3.993.260.387,00	DINAS SOSIAL
	1	0S	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD															

								Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan	17 Laporan	34.246.600,00	31.600.100,00	27.597.200,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			36.181.530,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100 %	100 %	50.857.700,00	44.328.900,00	44.328.900,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Dinas Sosial		19.934.954,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	2.590.000,00	0,00	0,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses			0,00	DINAS SOSIAL

																	pendidikan, kesehatan dan daya beli					
	1	06	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	48.267.700,00	44.328.900,00	41.476.500,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			19.934.954,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100 %	100 %	6.935.900,00	4.082.200,00	4.082.200,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Dinas Sosial		7.283.546,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																

								Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	4 Dokumen	6.935.900,00	4.082.200,00	2.521.600,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			7.283.546,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100 %	100 %	152.458.830,00	149.707.500,00	149.707.500,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Dinas Sosial		162.905.832,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	12.695.700,00	10.007.200,00	4.991.300,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses			13.337.132,00	DINAS SOSIAL

																	pendidikan, kesehatan dan daya beli					
	1	0 6	0 1	2. 0 6	00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	6.789.420 .00	6.788.700 ,00	4.436.900 ,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			7.128.891 .00	DINAS SOSIAL
	1	0 6	0 1	2. 0 6	00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	2.407.200 .00	2.407.200 ,00	2.407.200 ,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			5.328.939 .00	DINAS SOSIAL
	1	0 6	0 1	2. 0 6	00 07	Penyediaan Bahan/Material																

							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			10.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	8.466.810.00	8.465.900,00	5.118.300,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			8.890.151.00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	112.099.700,00	112.038.500,00	73.260.700,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia			117.720.719,00	DINAS SOSIAL

														Kel/Desa			dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli					
	1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100 %	100 %	138.325.000,00	97.477.300,00	97.477.300,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Dinas Sosial		94.090.574,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	8 Unit	138.325.000,00	97.477.300,00	97.477.300,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			94.090.574,00	DINAS SOSIAL

	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100 %	100 %	348.884.050,00	350.682.084,00	350.682.084,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Dinas Sosial		1.082.327.290,00	DINAS SOSIAL
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	1.000.000.00	500.000.00	500.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			1.815.000.00	DINAS SOSIAL
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	109.158.000,00	111.457.534,00	96.493.085,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia			118.825.102,00	DINAS SOSIAL

														Kel/Desa			dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli					
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	238.726.050,00	238.724.550,00	212.131.450,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			961.687.188,00	DINAS SOSIAL
	1	05	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100 %	100 %	386.165.980,00	357.332.000,00	357.332.000,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Dinas Sosial		347.065.178,00	DINAS SOSIAL
	1	05	01	209	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																

							Jumlah Kendaraan	1 Unit	1 Unit	73.880.000,00	42.370.000,00	42.370.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			40.726.350,00	DINAS SOSIAL
							Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya														
	1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	164.322.300,00	164.250.000,00	164.250.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			171.101.000,00	DINAS SOSIAL
	1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit	21.963.430,00	14.712.000,00	14.712.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia			24.159.828,00	DINAS SOSIAL

														Kel/Desa			dalam meng				
																	akses pendidikan, kesehatan dan daya beli				
	1	06	01	2.09	00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	5 Unit	136.000.000,00	136.000.000,00	318.410.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			111.078.000,00	DINAS SOSIAL
2	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Bantuan Sosial yang Tersalurkan Persentase PSKS yang Aktif	89 100 % %	100 89 % %	10.580.430.800,00	6.519.556.600,00	5.886.969.900,00							11.659.429.089,00	
	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS Kota Pasuruan yang tedata	511 Orang	511 Orang	10.580.430.800,00	6.519.556.600,00	6.519.556.600,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan	Masyarakat Kota Pasuruan		11.659.429.089,00	DINAS SOSIAL

																	daya beli				
	1	0 3	0 2	2. 0 3	00 01	Peningkatan Kemampuan Potens Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota															
							Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	108 Orang	93 Orang	874.260.000,00	654.084.900,00	578.059.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			917.974.134,00	DINAS SOSIAL
	1	0 3	0 2	2. 0 3	00 02	Peningkatan Kemampuan Potens Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota															
							Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	4 Orang	12.453.800,00	33.520.300,00	32.920.300,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			13.076.678,00	DINAS SOSIAL
	1	0 3	0 2	2. 0 3	00 03	Peningkatan Kemampuan Potens Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota															

							Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	2954 Keluarga	1381 Keluarga	7.883.550.300,00	4.315.064.600,00	3.742.808.900,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			8.827.704.039,00	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota															
							Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Lembaga	6 Lembaga	1.810.165.900,00	1.516.886.800,00	1.533.181.700,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			1.900.674.237,00	DINAS SOSIAL
3	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang direhabilitasi sesuai tahun dasar	9.2 %	9.2 %	2.035.075.600,00	1.498.936.640,00	1.121.232.860,00								2.590.220.674,00	
	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak	Persentase PPKS yang Mendapatkan Layanan Sosial	9.2 %	9.2 %	384.045.300,00	256.261.800,00	256.261.800,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlant		573.509.360,00	DINAS SOSIAL

						Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial										manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	ar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				
	1	0 6	0 4	2. 0 1	00 04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga															
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	303.755.500,00	206.442.300,00	151.666.200,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			453.101.996,00	DINAS SOSIAL
	1	0 6	0 4	2. 0 1	00 08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar															
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	80.289.800,00	49.819.500,00	17.472.900,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan			120.407.364,00	DINAS SOSIAL

																dan daya beli					
	1	0 3	0 4	2. 0 2		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS yang terakses layanan sosial dasar	9.2 %	9.2 %	1.651.030.300,00	1.242.674.840,00	1.242.674.840,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	-		2.016.711.314,00	DINAS SOSIAL
	1	0 3	0 4	2. 0 2	00 01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan															
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	38 Orang	38 Orang	40.921.400,00	20.938.400,00	12.583.900,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			45.360.893,00	DINAS SOSIAL
	1	0 3	0 4	2. 0 2	00 05	Penyediaan Alat Bantu															

							Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	25 Orang	231.243.100,00	218.808.300,00	215.359.700,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			281.623.304,00	DINAS SOSIAL
	1	05	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																
							Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	16570	16570	1.260.154.300,00	909.233.340,00	666.277.360,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			1.552.479.968,00	DINAS SOSIAL
	1	05	04	2.02	0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	25 Orang	118.711.500,00	93.694.800,00	57.872.800,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			137.247.149,00	DINAS SOSIAL

4	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase DTKS yang di update	1,4 %	1,4 %	6.276.592.883,00	5.748.284.483,00	5.727.555.955,00							6.850.600.661,00	
	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase DTKS yang di Update	1.4 %	1.4 %	6.276.592.883,00	5.748.284.483,00	5.748.284.483,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Masyarakat Kota Pasuruan		6.850.600.661,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	45495 Keluarga	45495 Keluarga	539.377.100,00	208.016.100,00	181.906.300,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			637.929.485,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga														

							Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	692 Keluarga	692 Keluarga	1.690.077.600,00	1.493.130.200,00	1.498.511.472,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			1.463.151.575,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat															
							Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1467 Orang	1467 Orang	4.047.138.183,00	4.047.138.183,00	4.047.138.183,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			4.749.519.601,00	DINAS SOSIAL
5	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban bencana yang tertangani	63 %	63 %	542.864.660,00	301.479.800,00	186.635.800,00								573.157.893,00	
	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase jumlah korban bencana yang tertangani	63 %	63 %	105.606.740,00	98.138.800,00	98.138.800,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya	Masyarakat Korban Bencana Alam		114.037.077,00	DINAS SOSIAL
						Kabupaten/Kota															

																manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli					
	1	0 5	0 6	2. 0 1	00 01	Penyediaan Makanan															
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	12000 Orang	12000 Orang	60.766.200,00	60.764.300,00	35.768.400,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			63.804.510,00	DINAS SOSIAL
	1	0 5	0 6	2. 0 1	00 02	Penyediaan Sandang															
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	6.529.380.00	6.411.900,00	3.168.100,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan			6.855.84900	DINAS SOSIAL

																	daya beli				
	1	03	06	2.01	0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi															
							Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Unit	4 Unit	3.872.660.00	3.852.600,00	1.906.600,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			4.066.293.00	DINAS SOSIAL
	1	03	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan															
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	3.300.000.00	3.000.000,00	1.500.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			3.465.000.00	DINAS SOSIAL

	1	0 3	0 6	2. 0 1	00 05	Pelayanan Dukungan Psikososial													
							Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	25 Orang	31.138.500,00	24.110.000,00	12.053.700,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli			35.845.425,00	DINAS SOSIAL
	1	0 3	0 6	2. 0 2		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten /Kota	Jumlah Orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten /Kota	59 Orang	59 Orang	437.257.920,00	203.341.000,00	203.341.000,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	-		459.120.816,00	DINAS SOSIAL
	1	0 3	0 6	2. 0 2	00 02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana													
							Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	48 Orang	46 Orang	437.257.920,00	203.341.000,00	132.249.000,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan,	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya			459.120.816,00	DINAS SOSIAL
							Kewenangan Kabupaten/Kota						Semua			manusia				

													Kel/Desa			dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli				
6	1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase cakupan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	2,1 %	2,1 %	56.276.440,00	88.976.300,00	31.837.100,00							59.090.262,00	
	1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	211 Makam	211 Makam	56.276.440,00	88.976.300,00	88.976.300,00			-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan daya beli	Taman Makam Pahlawan yang Dipelihara		59.090.262,00	DINAS SOSIAL
	1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota														
							Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	254 Makam	257 Makam	56.276.440,00	88.976.300,00	31.837.100,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan,			59.090.262,00	DINAS SOSIAL

| | | |

BAB IV. PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Pasuruan disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, efektivitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2025 merupakan acuan dan pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kota Pasuruan Tahun 2025 dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Bagi Perangkat Daerah Tahun 2025. Program dan kegiatan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai target yang telah ditetapkan.

Pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini, terdapat penyesuaian anggaran yang dilakukan sebagai upaya efisiensi, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Apabila berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja terdapat hal-hal yang memerlukan penyesuaian, baik kegiatan, anggaran, maupun sasaran, maka akan dilakukan Perubahan Rencana Kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 26 Juni 2025

Kepala Dinas Sosial

Kota Pasuruan

KOKOH ARIE HIDAYAT, S.E.,S.Sos.,MM

Pembina Utama Muda

NIP. NIP. 197609191996021003